

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perdagangan Manusia merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM. Menyikapi hal tersebut negara wajib memberikan perlindungan terhadap warganya. Pekerja migran Indonesia di Malaysia seringkali menjadi korban perdagangan. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pandemi Covid 19 salah satunya adalah faktor pendorong dalam memberikan peningkatan perdagangan manusia.

Krisis yang melanda dunia pada akhir 2019 ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Permasalahan tersebut menyebabkan banyak orang mengalami kendala finansial. Sehingga hal tersebut mendorong kebutuhan warga negara Indonesia terhadap pekerjaan yang dinilai menyebabkan tingginya penyeludupan manusia. Hal ini didukung dengan banyaknya warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri.

Malaysia merupakan negara yang dekat secara geografis dengan Indonesia sehingga memungkinkan mobilitas yang tinggi terjadi antaranya. Terlebih diketahui bahwa Malaysia memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja asing. Faktor tersebut mendorong terjadinya proses migrasi yang besar dari Indonesia ke Malaysia. Hal tersebut sangat baik dengan catatan kedua negara bisa memberikan perlindungan hukum yang maksimal untuk meminimalisasi perdagangan manusia.

Tetapi diketahui bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara yang memiliki proses rumit dalam migrasi sehingga menyebabkan banyaknya WNI yang memilih untuk bermigrasi secara ilegal ke Malaysia. Penyeludupan manusia secara ilegal tentunya berdampak pada tingginya angka perdagangan manusia.

Negara secara sengaja maupun tidak sengaja memberikan dampak terjadinya perdagangan manusia. Indonesia dan UNODC memiliki kerja sama yang sudah berlangsung sejak 2012, kerja sama tersebut dinilai masih kurang efektif jika dilihat dari bukti perdagangan manusia yang masih saja terjadi. Disisi lain bentuk dari kerja sama yang dilakukan antara UNODC dan Indonesia menunjukkan hanya bekerja pada jajaran pemerintah. Hal ini terbukti dengan pengetahuan masyarakat yang masih minim terhadap perdagangan manusia.

Faktor disengaja dilakukan oleh pejabat-pejabat migrasi yang terlibat korupsi di perbatasan. Sudah sepatutnya negara memberikan pertanggung jawabannya dan segera berbenah untuk mengatasi perdagangan manusia. Selain itu perdagangan manusia dijalankan oleh sindikat kejahatan lintas negara yang terorganisir didalamnya terdapat mafia independen. Sindikat kejahatan tersebut selalu meregenerasi dan mentransformasi cara-cara baru.

Di era perkembangan teknologi bentuk kejahatan semakin berkembang sehingga perlu penanganan yang lebih maksimal dalam menyesuaikan motif-motif baru dalam perdagangan manusia. Sesuai dengan laporan kedutaan besar Amerika Serikat, Malaysia masih belum memberikan upaya yang maksimal dalam memberikan penanganan terhadap perdagangan manusia. Selain menjadi negara penampung Malaysia juga di identifikasikan sebagai negara transit. Beberapa

korban diterbangkan dari Malaysia ke Timur Tengah dan beberapa daerah lainnya. Ini menunjukkan bahwa permasalahan perdagangan manusia terhadap PMI di Malaysia juga merupakan tanggung jawab bersama.

